

PENDIDIKAN KRITIS BERDIMENSI IDEOLOGIS KULTURAL

Dr. Drs. Anak Agung Gde Putera Semadi, M.Si.
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Dwijendra Bali, Indonesia
puterasemadi60@gmail.com

ABSTRACT

In an effort to develop a critical education, the concept of education needs to be formulated as a process of cultural dimension / humanization process. The process of education can not be separated from human life in order to create cultural and cultural heritage (cultural creation and cultural transmission) to the young generation. Through the process of critical education, human beings are able to develop various potentials or creativity, taste, intention, and work that become the core of cultural process, because culture in the essential concept of education can be formulated as "The shared product of human learning". The main functions and targets of the paradigm to develop critical education are self-awareness, also known as critical awareness, and develop the main method of learning by emphasizing the principle of critical dialogical domination. Thus, the core process of critical education is not just the transfer of science / information, but is a psychological process or cultural practice towards awareness / self-liberation of learners.

Keywords: Critical education, critical awareness, Dialogical-critical.

Abstrak

Dalam upaya mengembangkan pendidikan kritis, maka konsep pendidikan perlu dirumuskan sebagai proses berdimensi kultural/proses humanisasi. Proses pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia dalam rangka penciptaan budaya sekaligus pewarisannya (*cultural creation and cultural transmission*) kepada generasi muda. Melalui proses pendidikan kritis manusia mampu mengembangkan berbagai potensi atau daya cipta, rasa, karsa, dan karya yang menjadi inti proses budaya, karena budaya dalam konsep esensial pendidikan dapat dirumuskan sebagai "*The shared product of human learning*". Fungsi serta sasaran utama paradigma mengembangkan pendidikan kritis adalah upaya penyadaran diri, atau disebut pula dengan istilah kesadaran kritis, serta mengembangkan metode utama pembelajarannya dengan menekankan prinsip dominasi dialogis kritis. Jadi, inti proses pendidikan kritis bukanlah sekadar transfer ilmu/informasi, melainkan merupakan proses kejiwaan atau praktik kebudayaan menuju penyadaran/pembebasan diri peserta didik.

Kata kunci: Pendidikan kritis, Kesadaran kritis, Dialogis-kritis.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya konsep dan implementasi pendidikan kritis di Indonesia sudah mulai berkembang sejak zaman revolusi kemerdekaan. Hal ini dapat dibuktikan melalui mutiara-mutiara pemikiran dan perilaku kebangsaan beberapa tokoh pahlawan nasional antara lain R.A. Kartini, Dr Sutomo, dan K.H. Dewantara. Perjuangan tokoh-tokoh nasionalisme ini banyak menuai badai baik dalam ruang ideologis maupun pragmatis. Perbedaan paradigma para pemikir pendidikan waktu itu bernuansa aneka kepentingan seperti sosial, adat-istiadat, sikap feodalisme internal dan eksternal. Demikian pula kepentingan politik nasionalisme RI yang sering mendapat tekanan dari bangsa penjajah. Kenyataan itu bergulir dalam kurun waktu yang relatif panjang guna mendapatkan solusi terbaik dan tepat untuk tumbuh dan berkembangnya falsafah multikulturalisme serta karakter anak bangsa agar hasilnya dapat diwariskan bahkan diteladani oleh semua generasi penerus pengemban dan pengisi kemerdekaan ini. Pergolakan tarik-ulur kepentingan antara idealisme (berbasis pada nilai-nilai akademik) dengan pragmatisme (berbasis pada nilai koporasi) dalam dunia pendidikan tersebut menimbulkan banyak pengorbanan baik fisik maupun mental spiritual, dan tidak ketinggalan pula pengorbanan yang berupa material.

Berbicara masalah idealisme dan pragmatisme pendidikan, Nuryanto dalam Arief, dkk.(2016:11) menyatakan bahwa di antara keduanya: idealisme dan pragmatisme pendidikan, terdapat tiga kemungkinan

adanya relasi, yakni: **pertama**, menjadikan nilai-nilai akademik sebagai basis institusi pendidikan; **kedua**, menjadikan nilai-nilai koporasi sebagai basis institusi pendidikan; dan **ketiga**, menjadikan nilai-nilai akademik dan koporasi bersama-sama sebagai basis institusi pendidikan karena kedua nilai ini dipastikan setara, tidak satu di atas yang lain. Memasukkan nilai-nilai tersebut dalam institusi pendidikan memiliki implikasi yang sangat signifikan. Dengan demikian, maka perlu pemikiran dan pertimbangan yang matang untuk meletakkan nilai apa yang paling relevan dijadikan sebagai basis institusi pendidikan itu.

Permasalahannya sekarang adalah apakah pendidikan akan lebih memengaruhi realitas sosial, atau sebaliknya realitas sosial yang akan lebih banyak memengaruhi pendidikan? Di satu sisi (perhatikan Neil Postman, 1955) pendidikan mempunyai peran yang luar biasa dalam membentuk kehidupan publik, bahkan peran itu tidak sekadar memberi afirmasi atas peran pendidikan dan kehidupan publik, tetapi justru pertanyaan: “kehidupan publik seperti apa yang hendak dibentuk oleh dunia pendidikan...?” Pertanyaan ini didasarkan pada satu keyakinan bahwa pendidikan itu betul-betul memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk kehidupan politik dan kultural (Arief, dkk., 2016:12). Inilah satu asumsi yang notabene melatarbelakangi pentingnya pengembangan kesadaran kritis bagi peserta didik melalui paradigma pendidikan kritis yang berdimensi ideologis kultural.

II. METODE

Bentuk tulisan yang berlatar paradigma *culture studies* ini dirancang

sebagai suatu bagian penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang mengutamakan objek kajiannya pada permasalahan teks (verbal dan audiovisual) serta konteksnya ada di masyarakat. Penelitian kualitatif tergolong sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata serta data berupa gambar yang pada prinsipnya dapat diamati dan dideskripsikan dengan jelas tanpa menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.

Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis. Semua data lapangan serta data dari hasil studi pustaka yang telah diklasifikasi dikaji dengan teori dekonstruksi. Untuk memperoleh uraian yang tajam, mendalam, logis, dan sistematis, maka aplikasi metode analisis deskriptif dalam penelitian ini jelas tidak dapat dihindari. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive random sampling* dan dikembangkan dengan teknik *snowball*. Sumber data diperkuat pula dengan instrumen penelitian berupa pedoman observasi partisipasi, pedoman wawancara mendalam, rekaman, serta studi dokumen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Mengembangkan Kesadaran Kritis

Orientasi pendidikan yang didasarkan pada ideologi idealisme tidak sekadar penguasaan pengetahuan instrumental, tetapi juga pengetahuan emansipatoris ala Habermasian. Menurut Arief, penekanan utama dalam proses pedagogis adalah bagaimana memahami, mengkritik, memproduksi, dan bahkan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami dan mengubah realitas hidup. Proses pedagogis dan edukatif lebih diarahkan untuk mengembangkan kesadaran

kritis peserta didik daripada sekadar untuk menguasai keterampilan-keterampilan teknis (2016:14). Kesadaran kritis (*critical consciousness*) adalah *mode of thought* yang mampu mendeteksi fenomena-fenomena tersembunyi atau melampaui asumsi-asumsi yang hanya berdasarkan *common sense*. Kesadaran kritis pada dasarnya adalah kemampuan berpikir kritis yang di dalamnya terkandung dimensi politik dan kultural.

Kesadaran kritis memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan istilah “upaya penyadaran diri”. Seorang tokoh terkemuka pendidikan kritis, Freire (1968), menyebutkan istilah ini dengan *conscientizacao*, sebagai fungsi serta sasaran utama dalam mengembangkan pendidikan kritis. Menurut Yunus (2007) dalam Wija (2009:46), inti dari konsep kesadaran kritis itu adalah proses dialektis-dialogis yang mengantarkan individu secara bersama-sama untuk memecahkan masalah substansial dan eksistensi yang melekat pada kesadaran masyarakat. Muara dari proses ini adalah terwujudnya pembebasan diri, dalam arti transformasi sistem/struktur dan realitas normatif (penciptaan norma, aturan, prosedur) yang membelenggu atau mengunci ketidakberdayaan individu serta reformasi perilaku yang tidak sesuai dengan sistem dan realitas yang baru.

Kesadaran kritis merupakan salah satu dari tiga jenis tipe kesadaran yang ada selain kesadaran magis dan kesadaran naif. Khusus tentang kesadaran kritis, jenis kesadaran ini dapat dijelaskan sebagai tipe kesadaran yang melihat atau mencari akar kondisi yang dihadapi kelas bawah (kelompok terdominasi) itu pada struktur sosial, politik, ekonomi, serta budaya yang melatari mereka. Kondisi ini sering tidak disadari oleh kelompok marginal tersebut karena dikemas sebagai sesuatu yang alamiah

(rasional), dan mereka dianggap ikut menopangnya.

2.2 Mengembangkan Proses Dialogis-Kritis

Pendidikan kritis memiliki peran sangat strategis dan krusial dalam mendukung bahkan mempercepat pembentukan masyarakat demokratis berkeadaban, yang menjadi salah satu karakter terpenting masyarakat madani Indonesia. Selain itu, pendidikan kritis juga berperan mempersiapkan anak bangsa, baik secara individual maupun sosial agar memiliki kemampuan, keterampilan, etos, dan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam perkembangan masyarakat madani.

Seorang pemikir sekaligus penulis besar Rusia, Lev N. Tolstoy (1828-1910) pernah menyatakan bahwa:

“Pendidikan mampu mengubah dunia, menciptakan kebudayaan, mengukir sejarah, merekayasa dunia menjadi lebih adil dan manusiawi...”

Pendidikan memiliki segala hal untuk melakukan perubahan: konsep, gagasan, sistematika, kekuatan...”

Dalam berbicara masalah pendidikan biasanya cenderung berpikir pada dua dimensi, yakni: (1) dimensi praktis pedagogik, dan (2) dimensi normatif. Menurut Surakhmad (1977:7) dalam Wija (2009:1), dimensi pertama, adalah dimensi teknis yang menyangkut berbagai strategis, proses, serta tindakan mengembangkan serta memfungsikan pendidikan dalam masyarakat secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nasional. Dimensi kedua, meliputi kebijakan yang

berusaha dapat merumuskan nilai-nilai kependidikan sebagai landasan yang sangat signifikan untuk mewujudkan cita-cita bersama baik dalam skala mikro (keluarga/masyarakat) maupun skala makro (kehidupan berbangsa dan bernegara).

Selain kedua dimensi di atas, tentunya masih ada lagi satu dimensi strategis yang lazim diperhitungkan (walau sering diabaikan) dalam setiap berbicara masalah realitas problematik pendidikan. Dimensi tersebut adalah dimensi ideologis kultural. Dimensi ini kurang lebih meliputi aspek praktik relasi kekuasaan, bias persepsi kultural laten, ekspansi dominasi ideologi global (globalisasi), ilusi sebagai dampak upaya pencitraan (imagologi) dalam pendidikan, dan bahkan ilusi pencapaian kualifikasi pendidikan yang bersifat absurd. Dore (1976) mengistilahkan hal ini sebagai *diploma disease*.

Pada hakikatnya melihat proses pendidikan berdimensi ideologis kultural berarti menenpatkan posisi pendidikan itu sebagai bagian dari jaringan praktik sosial budaya yang kompleks dari satu masyarakat. Pendidikan tidak hanya harus dibatasi pada praktik-praktik pembelajaran di lembaga sekolah (*schooling*), melainkan juga menyangkut berbagai kehidupan yang secara umum sering disebut sebagai proses ke kebudayaan. Sosiolog Worsley (1971:180-192) menyebutkan bahwa:

“Education can never be divorced from its social setting, since the actors in education are social actors who carry with them the symbols and orientations marking them as belonging to distinct sectors of society” (Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari latar belakang sosial, karena para pelaku dalam pendidikan itu adalah aktor sosial yang

membawa serta simbol dan orientasi yang menandai mereka sebagai bagian dari sektor masyarakat yang berbeda)

Melalui proses pendidikan kritis berdimensi ideologis kultural, maka manusia pada umumnya dan peserta didik khususnya tentu diharapkan mampu mengembangkan berbagai potensi atau daya cipta, rasa, karsa, dan karya yang menjadi inti proses budaya. Dalam hal ini, tidak mengherankan apabila budaya dalam konsep esensial pendidikan dirumuskan oleh John Singleton (dalam Spindler, ed. 1974:26) sebagai *“the shared product of human learning”* (Wija, 2009:7).

Memerhatikan beberapa batasan di atas, maka tidak berlebihan apabila dalam upaya mengembangkan pendidikan kritis ketiga dimensi di atas hendaknya mendapat ruang wacana yang seimbang, di samping proses pendidikan dirumuskan sebagai proses berdimensi ideologis kultural, atau dapat diistilahkan sebagai proses humanisasi (pemanusiaan manusia). Proses pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia dalam rangka penciptaan budaya sekaligus pewarisannya (*cultural creation and cultural transmission*) kepada generasi muda. Oleh karena itu, paradigma pendidikan kritis perlu dikembangkan dengan berpijak pada landasan ideologis kultural yang kokoh.

Keprihatinan di kalangan ahli pendidikan dan ilmuwan-ilmuwan sosial lainnya terhadap realitas ketidakmerataan kesempatan mendapatkan pendidikan (*inequality in education*) terutama bagi kalangan masyarakat kelas bawah telah melatarbelakangi lahirnya satu model pendidikan yang sangat berarti dalam mengadakan reformasi dan demokratisasi pendidikan yang berkualitas di masa depan. Model pendidikan ini lebih populer disebut pendekatan pendidikan kritis. Paradigma

model pendidikan kritis ini diyakini mampu membantu kaum marginal dalam masyarakat untuk menyadari realitas sosial yang dihadapi sekaligus menjadi awal bagi upaya mengubah sistem serta struktur yang membelenggu mereka. Intinya model pendidikan ini akan mendorong kelompok bawah untuk membebaskan dirinya sendiri melalui proses penyadaran diri sebagai esensi tujuan proses pendidikan yang dijalaninya. Wija (2009:41) menambahkan: bahwa model pendidikan kritis adalah proses penyadaran diri yang sangat terkait dengan kesadaran kritis.

Metode utama pendidikan kritis dalam pembelajarannya sangat didominasi oleh prinsip “dialogis-kritis”. Ciri-cirinya sebagai berikut:

Pendekatan pembelajaran dialogis-kritis (dialog bebas) berbeda dengan komunikasi monologis terarah pada proses pendidikan tradisional yang biasanya berujung pada sasaran tersembunyi berupa domestifikasi sikap peserta didik terhadap lingkungannya. Pada hakikatnya komunikasi dialogis kritis bertujuan mengembnbangkan sikap ataupun kesadaran kritis sebagai agen pembebasan diri subjek didik. Proses ini diistilahkan Freire sebagai aktivitas *cointensional*, yaitu gerak bersama antara guru-murid untuk mencapai tujuan bersama. Dari segi belajarnya, inti proses dialogis kritis ini berupa gabungan antara gerak “refleksi” dan “aksi”. Refleksi merupakan perenungam (balik) untuk mencapai kesadaran mendalam sebagai inti makna proses belajar. Sedangkan aksi dimaksudkan

sebagai tindakan nyata (proses praksis) dalam rangka penyadaran diri tersebut. Refleksi dan aksi harus dikembangkan secara bersamaan. Oleh karena refleksi tanpa aksi hanya menghasilkan beragam wacana (*verbalisme*). Selanjutnya di sisi lain, tindakan (aksi) tanpa refleksi hanyalah bermakna *aktivisme* (aktivitas tanpa didukung kesadaran mendalam). Suasana dialogis dari komunikasi di seputar guru-murid hanya mungkin dikembangkan melalui semangat “cinta sesama” (jadi bersifat *non-hierarchis*) (Wija, 2009:46-47).

Dari suasana belajar di atas lebih lanjut dapat dikatakan bahwa peran peserta didik sangat didorong oleh keinginan untuk menjadikan dirinya *co-investigator* bersama guru dalam berbagai aktivitas serta kegiatan ilmiah di sekolah. Inti materi belajarnya berupa realitas konkret yang ada di sekitar siswa, yaitu realitas eksistensial siswa sebagai satu proses kodifikasi keseluruhan keberadaan hidupnya. Topik-topik keadaan ini kemudian dikodifikasi (dibedah) untuk akhirnya mencapai tingkat pengetahuan kritis (pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana adanya). Praktik pembelajaran seperti ini dapat disejajarkan dengan CTL (*Contextual Teaching and Learning* : Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual). Atau dengan kata lain, sering juga dikenal dengan istilah PPE (*Problem Posing Education* : Pendidikan dengan pola hadap masalah), yakni: pola pendidikan yang secara mendasar bertujuan untuk mentransformasikan sistem serta struktur sosial yang memarginalkan diri peserta didik dengan memampukan individunya untuk mengembangkan kekuatan diri (*self-*

empowerment), serta meningkatkan kemampuan memahami sekaligus mengungkapkan eksistensi realitas dirinya (*unveiling the reality*). Berikut adalah beberapa prasyarat utama dalam mengembangkan pendidikan kritis yang dilandasi dengan pendekatan PPE ;

1. Mendorong siswa memosisikan dirinya sebagai agen proses demitologisasi atau dekodifikasi (dekonstruksi) realitas yang dihadapinya. (permasalahan riil yang ada di lingkungannya).
2. Memandang dialog sebagai hal yang esensial dalam proses belajar melalui tindakan kognisi yang memberi peluang bagi proses *constant unveiling of reality*: pengungkapan realitas diri secara berkelanjutan.
3. Pengakuan historisitas umat manusia sebagai titik pangkal, yaitu bahwa manusia bisa mengubah nasibnya dalam sejarah hidupnya melalui kesadaran kritis.

Arah pengembangan pendidikan kritis yang berkualitas memerlukan landasan budaya yang kuat. Peristiwa pendidikan merupakan bagian dari budaya suatu komunitas bangsa. Oleh karena itu, langkah-langkah pengembangan pendidikan kritis tidak bebas dari kebudayaannya, atau harus memerhatikan faktor-faktor sosialbudaya masyarakat. Untuk memadukan sistem budaya di dalam masyarakat atau bangsa yang berkaitan dengan upaya mengembangkan pendidikan kritis, maka pendapat K.H. Dewantara (1977) dalam Uno dan Lamatenggo (2016:131) tentang Asas Trikonnya menjadi faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Asas Trikon K.H. Dewantara meliputi: (1) Kontinuitas, (2) Konvergensi, dan (3) Konsentris. Dengan demikian, pendidikan yang penting bagi bangsa Indonesia adalah pendidikan

yang beeciri khas Indonesia, yakni: pendidikan yang menitikberatkan pada kepentingan bangsa. Artinya: pendidikan harus mampu menyiapkan peserta didik dalam menghadapi masa depan tanpa meninggalkan aspek-aspek kecerdasan berdasarkan pada keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab yang sungguh-sungguh.

Menurut Adnan, pendidikan yang diperlukan bangsa Indonesia adalah pendidikan yang dapat: *Pertama*, memperkuat jatidiri kesadaran bangsa; *Kedua*, seyogyanya bukan hanya menekankan diri pada segi intelektualitas dan materialitas, tetapi juga menumbuhkan potensi rohaniah; *Ketiga*, tetap memiliki visi untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa yang menjunjung tinggi nilai etika, moral dan kemanusiaan (Adnan, 1999:132).

Jadi, dilihat dari sudut pandang di atas, maka salah satu alternatif yang tidak dapat diabaikan dalam mengantisipasi masa depan pendidikan bangsa adalah menyiapkan diri, khususnya bagi generasi muda melalui strategi pendidikan (pembinaan) yang mendorong munculnya kesadaran kritis atas kondisi/realitas lingkungannya. Melalui pendidikan yang demikian, paling tidak mereka dapat menjadi lebih awas menghadapi berbagai jebakan ideologis dari kepentingan eksternal yang merugikan perkembangan kehidupan ke depan. Di sinilah letak garis besar paradigma pengembangan model pendidikan kritis (*Educational for Critical Consiousness*) itu. Lebih tepat: pendidikan kritis berdimensi ideologis kultural.

III. SIMPULAN

Paradigma mengembangkan model pendidikan kritis berdimensi ideologis kultural pada hakikatnya lebih diarahkan pada perwujudan kesadaran kritis dan implementasi metode pembelajaran yang didominasi oleh prinsip dialogis-kritis. Dalam hal ini peran peserta didik sangat didorong oleh keinginan untuk menjadikan dirinya *co-investigator* bersama guru dalam berbagai aktivitas serta kegiatan ilmiah di sekolah. Inti materi belajarnya berupa realitas konkret yang ada di sekitar siswa, yaitu realitas eksistensial siswa sebagai satu proses kodifikasi keseluruhan keberadaan hidupnya.

Education for Critical Consiousness (pendidikan kritis) pada prinsipnya menyiapkan diri dan mendorong bangkitnya kesadaran kritis generasi muda dari kondisi dan realitas lingkungannya. Hal ini merupakan satu langkah strategis yang dapat menumbuhkan sikap lebih awas dalam menghadapi berbagai jebakan ideologis dari kepentingan eksternal yang merugikan perkembangan kehidupan ke depan. Misi utamanya adalah untuk menumbuhkan gegerasi baru yang sanggup menjalani tradisi baru ke arah dunia baru, penuh dengan jebakan dan kepentingan yang dibawanya.

Untuk dapat mewujudkan hasil pengembangan pendidikan kritis yang berkualitas, maka cenderung ketiga dimensi pendidikan (praksis pedagogik, normatif, dan ideologis kultural) itu diberikan ruang yang sederajat baik dalam batas wacana maupun penerapannya. Pendidikan hendaknya dapat dirumuskan dengan matang sebagai proses berdimensi kultural. Mengembangkan pendidikan kritis yang berkualitas di atas landasan kebudayaan merupakan kunci pokok (cipok) penyadaran

diri setiap anak bangsa/generasi muda bangsa yang tangguh. Esensi pendidikan kritis adalah upaya membebaskan manusia dari penindasan struktural melalui proses pedagogi yang berintikan penyadaran diri yang kritis (kesadaran kritis). Secara lebih luas tentu hal ini menyangkut refleksi dan aksi kultural menuju pembebasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Habib, 1999. *Agama Masyarakat dan Reformasi Kehidupan*. Denpasar: PT. BP.
- Arif, Mukhrizaal, dkk., 2016. *Pendidikan Posmodernisme Telaah Kritis Pemikiran Tokoh Pendidikan*. Yogyakarta: AR. RUZZ MEDIA.
- Azra, Azyumardi, 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Darmaningtys, 2015, *Pendidikan Yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Intrans Publishing.
- Dore, Ronal, 1976. *The Diploma Disease: Education Qualifacation and Development*. London: Gweworge Allen & Unwin Ltd.
- Freire, Paulo, 1974. *Education for Critical Consiousness*. New York: Seabury Press.
- _____, 2017. *Politik Pendidikan Keudayaan Kekuasaan dan Pembebasan*. Yogyakarta: Read (Research, Education and Dialogue) bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Lay, Cornelys, 2001. *Nasionlisme Etnisitas*. Yogyakarta: Dian/Interfidei, Kompas dan Forum Wacana Muda.
- Seri Buku Saku Tempo, 2017. *Gelap TerangHidup Kartini*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Popular Gramedia) bekerjasama dengan Tempo Publishing.
- Singleton John, 1974. *Implication of Education as cultural Transmission*, dalam George D. Spindler, *Education and Cultural Process*. New York: Holt Rinehart & Winston Inc.
- Suryohadiprojo, Sayidiman, 1995. *Membangun Peradaban Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan Anggota IKAPI.
- Uno, Hamzah B., 2016. *Landasan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wija, I Gede, 2009. *Pendidikan Sebagai Ideologi Budaya*. Denpasar: Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Kajian Budaya Universitas Udayana bekerjasama dengan Sari Kahyangan Indonesia.